



KAPITALISASI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

M. Yunus

Pasca Sarjana Universitas Islam Lamongan
Ahmadyunusdf939393@gmail.com

Dian Dwi Alifatul Faizah

Pasca Sarjana Universitas Islam Lamongan
dienalieffa@gmail.com

***Abstrack:** The problems of Islamic education that are developing in schools today are numerous, one of which is capitalism Islamic education, education that the rights of each individual person are limited by financial ability. That is the high cost of private education, which in fact is an Islamic educational institution that usually has the word Islam behind the name of the school, such as Islamic elementary school, Islamic junior high school and the like. make education has come out of its true purpose. The paradigm of Islamic education does not distinguish between social groups in society, because learning is the right of every individual, everyone has the right to get a school education. It is time for us to implement the "social justice" paradigm, using the "human empowerment approach". approach to placing humans as humans. Humans are not adapted to goods. Humans are independent-autonomous beings, have potential that can be developed and realized. So it's fair that education will be implemented if we are all serious about transforming education with the concept of "humanizing humans".*

***Keywords:** capitalization, Islamic education.*

LATAR BELAKANG

Sesuai dengan sifatnya yang tidak pernah berakhir dari sisi proses (*never ending process*), pendidikan itu mempunyai banyak fase untuk ditelaah.¹ Pendidikan memang muncul dalam berbagai bentuk dan paham. Menurut Paulo Freire, pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan fungsi manusia menjadi manusia agar terhindar dari berbagai bentuk penindasan, kebodohan dan ketertinggalan. Pada dasarnya pendidikan memang diselenggarakan dalam rangka membebaskan manusia dari berbagai persoalan hidup. Selain itu, pendidikan banyak dipahami sebagai wahana untuk menyalurkan ilmu pengetahuan, alat pembentukan watak, alat mengasah otak, serta media untuk meningkatkan keterampilan kerja. Sementara bagi paham lain, pendidikan lebih diyakini sebagai suatu media untuk menanamkan nilai-nilai moral dan ajaran keagamaan, alat meningkatkan taraf ekonomi, alat mengurangi kemiskinan, alat mengangkat status sosial, dan juga wahana untuk menciptakan keadilan sosial. Melihat begitu pentingnya makna dari pendidikan bagi umat manusia, maka banyak peradaban manusia yang “mewajibkan” masyarakatnya untuk tetap menjaga keberlangsungan pendidikan. Sebagaimana peradaban kita sebagai umat Islam, yang selalu menanamkan kewajiban dalam menuntut ilmu, seperti “tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina” atau “tuntutlah ilmu dari buaian ibu sampai liang lahat”, sebagaimana sebuah hadist yang berbunyi :

طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة

¹ Firdaus M Yunus, 'Pendidikan Berbasis Realitas Sosial: YB Mangunwijaya-Paulo Freire', *Yogyakarta: Logung Pustaka*, 1 (2007).

Artinya : “Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi seorang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan”.

Begitupula dengan peradaban negara kita tercinta, Indonesia. Setiap tanggal 2 Mei kita merayakan Hari Pendidikan Nasional, semua ini tidak lain adalah untuk mempertahankan dan menjaga keberlangsungan pendidikan di Indonesia, dan juga seakan-akan negara kita ingin menegaskan bahwa pendidikan benar-benar modal buat membangun dan mengembangkan negeri ini. Apalagi dewasa ini, kita tengah memasuki suatu zaman baru yang ditandai dengan menguatnya paham pasar bebas, yang dikenal sebagai zaman globalisasi, maka tradisi umat manusia untuk mempertahankan eksistensi mereka melalui pendidikan mendapat tantangan, karena pendidikan sedang terancam dengan adanya sebagian manusia yang menyatakan bahwa dunia pendidikan dapat digunakan untuk mengakumulasi kapital dan mendapat keuntungan. Sehingga di zaman globalisasi ini pendidikan pun mulai terkesan dengan “mahalnya biaya sekolah”. Bahkan program pemerintah wajib belajar dua belas tahun itu hanya menjadi wacana saja di masyarakat, terlebih di daerah perkotaan. Beberapa sekolah sudah mematok uang pendaftaran dan uang gedung yang bernilai jutaan rupiah, belum lagi uang seragam dan lain-lain. Seperti yang dilansir Republika bahwa praktik *kapitalisme* yang terjadi pada dunia pendidikan, dituding masih menjadi salah satu akar permasalahan yang menghambat kemajuan pendidikan di negeri ini. Salah satu persoalan di tengah maraknya praktik *kapitalisme* dalam dunia pendidikan adalah belum terpenuhinya upah serta jaminan kerja yang layak bagi seluruh tenaga pendidikan.²

Apa yang terjadi dengan kebijakan dan praktik pendidikan? Bagaimana seharusnya kita selaku pemerhati dan praktisi pendidikan menyikapi persoalan-persoalan pendidikan yang memunculkan kekecewaan tersebut? Tetapi yang terlihat di lapangan sungguh berbeda, bahkan ironis. Kondisi dunia pendidikan kita sangat memprihatinkan dan semakin jauh dari cita-cita yang idealnya, yaitu sebagai wahana pembebasan manusia dan memanusiakan manusia.

KAJIAN TEORITIS, HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian *Kapitalisme* Pendidikan

Secara etimologi *kapitalisme* berasal dari kata kapital.³ Kapital berasal dari bahasa Latin yaitu *capitalis* yang sebenarnya diambil dari kata *kaput* (bahasa Proto-Indo-Eropa) berarti “kepala”. Arti ini menjadi jelas jika kita gunakan dalam istilah “pendapatan per kapita” yang berarti pendapatan per kepala. Kapital juga memiliki arti yang sama ketika dipakai dalam kalimat *capital city* (kota utama).

Secara terminologi, *kapitalisme* berarti suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya dengan bebas untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Sementara itu pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama, tapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan pribadi.

² Abdul Aziz Dahlan and Ensiklopedi Hukum Islam, ‘Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve’, *Jilid V*, 1998.

³ Cecep Sudirman Anshori, ‘Ukhuwah Islamiyah Sebagai Fondasi Terwujudnya Organisasi Yang Mandiri Dan Profesional’, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim*, 14.1 (2016), 117–25.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *kapitalisme* pendidikan terjadi apabila prinsip *kapitalisme* digunakan di dalam dunia pendidikan, negara tidak membatasi kepemilikan perorangan di dalam dunia pendidikan, artinya satuan penyelenggara pendidikan dapat dikuasai oleh perorangan (sektor swasta atau sektor non negara), dimana segala kebijakannya diatur oleh sektor swasta tersebut. Para pengelola di bidang pendidikan (swasta) mulai saling bersaing. Manajemen pelatihan yang unggul secara kompetitif membawa lebih banyak pengguna layanan pelatihan. Modal dari pengelolaan bidang pendidikan datang dan dapat dikumpulkan, tercipta monopoli, dengan harga (biaya pendidikan) ditentukan tanpa terlebih dahulu ada usulan dan permintaan dari pengguna jasa pendidikan. Pengelola pelatihan juga menawarkan harga (biaya pelatihan) tanpa mempertimbangkan keterampilan pengguna jasa pelatihan. Hal ini tentunya merugikan pengguna jasa pelatihan, karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan penawaran (biaya pelatihan). Akhirnya akan ada celah dimana orang kaya bisa mendapatkan pendidikan ini. Pada saat yang sama, pengguna layanan pendidikan yang kurang beruntung menghadapi kesulitan dalam mengakses pelatihan tersebut.

Tujuan dari proses pendidikan adalah adanya proses perubahan. Perubahan yang dimaksudkan adalah perkembangan secara alamiah menuju kedewasaan. Makna dari kedewasaan dalam hal ini adalah kematangan yang bersifat biologis, jasmani, rasa, dan karsa. Bahkan secara moral, dalam arti bertanggung jawab, sadar, dan normatif. Dalam sebuah hadist disebutkan bahwa “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka adalah ayahnya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi”. Karena itulah semua ulama berpendapat bahwa mendapatkan dalil dan ilmu guna menguatkan iman hukumnya fardhu ‘ain bagi setiap muslim.⁴ Dapat dipahami bahwa perubahan yang terjadi dalam proses berfikir, bertindak, dan beragama pada diri manusia adalah wujud dari proses pendidikan yang diperolehnya. Kemudian, pendapat Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Nurcholis Majid telah membagi fitrah manusia menjadi dua bentuk, yaitu:

- a) Fitrah al-Ghazirat, merupakan potensi dalam diri manusia yang dibawanya sejak lahir. Bentuk fitrah (potensi) ini antara lain adalah nafsu, akal, dan hati nurani.
- b) Fitrah al-Munazzalat, merupakan potensi yang bersumber dari luar diri manusia. Wujud fitrah ini adalah wahyu Ilahi yang diturunkan Allah untuk membimbing dan mengarahkan potensi yang ada pada diri manusia untuk berkembang sesuai dengan fitrahNya yang hanif. Semakin tinggi hubungan antara kedua fitrah manusia itu maka akan semakin tinggi pula kualitas manusia (insan kamil), akan tetapi bila kedua fitrah itu hubungannya tidak serasi atau berbenturan maka manusia akan semakin tergelincir dari fitrahnya yang hanif.

Dalam sejarahnya, seperti yang diungkap oleh Dudley Dillard, *kapitalisme* adalah istilah yang dipakai untuk menamai sistem ekonomi yang mendominasi dunia barat sejak runtuhnya feodalisme. Sebagai dasar bagi setiap sistem, yang disebut “kapitalis” ialah hubungan-hubungan di antara pemilik pribadi atas alat-alat produksi yang bersifat nonpribadi (tanah, tambang, instalasi industri, dan sebagainya yang secara keseluruhan disebut modal atau kapital) dengan para pekerja yang iarpun bebas namun tak punya modal, yang menjual jasa tenaga kerjanya kepada majikan. Di bawah *kapitalisme*, keputusan yang menyangkut produksi dibuat oleh kaum bisnis swasta dan diarahkan demi

⁴ Syaikh Abdul Majid Az-Zandani, *Ensiklopedi Iman* (Pustaka Al-Kautsar, 2016).

keuntungan pribadi. Para pekerja itu bebas dalam arti bahwa secara hukum mereka tidak dipaksa untuk bekerja kepada para pemilik alat produksi itu. Namun demikian, karena para pekerja itu tidak memiliki alat produksi yang diperlukan untuk bekerja sendiri, mereka dipaksa oleh keniscayaan ekonomis untuk menawarkan jasa, dengan syarat tertentu kepada para majikan yang mengendalikan alat produksi. Hasil tawar-menawar yang menyangkut upah akan menentukan proporsi dimana produksi total masyarakat akan dibagi antara kelas pekerja dengan kelas wiraswasta kapitalis.⁵

B. Dampak Kapitalisasi Pendidikan Islam

Berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. (dalam Prayitno, 2009). Pendidikan tidak hanya dilihat sebagai usaha untuk mengerahkan semua usaha itu dalam mencapai perubahan dalam diri, namun pendidikan juga adalah kegiatan dalam mentransformasikan ilmu dari satu pihak ke pihak lainnya.⁶

Secara etimologi kapitalisme berasal dari kata kapital. Kapital berasal dari bahasa latin yaitu *capitalis* yang sebenarnya diambil dari kata *kaput* (bahasa proto-indo-eropa) yang berarti “kepala”. Secara terminologi, kapitalisme berarti suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya dengan bebas untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Menurut Karl Marx, kapitalisme adalah sebuah sistem dimana harga barang dan kebijakan pasar ditentukan oleh para pemilik modal untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam sistem kapitalis ini, pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar demi keuntungan bersama, melainkan hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Lain halnya dengan Karl Marx, Adam Smith berpendapat bahwa kapitalisme adalah suatu sistem yang bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat apabila pemerintah tidak memiliki intervensi terhadap mekanisme dan kebijakan pasar. Di dalam kapitalisme ini pemerintah hanya berperan sebagai pengawas saja. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Max Weber, dimana Weber menganggap bahwa kapitalisme ialah sebagai sebuah sistem kegiatan ekonomi yang dituju pada suatu pasar dan juga yang dipacu untuk menghasilkan laba dengan adanya pertukaran pasar

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kapitalisme atau kapitalis adalah sebuah sistem ekonomi politik dimana terdapat perdagangan, industri, dan alat-alat produksi yang dikendalikan oleh pemilik modal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Adapun ciri-ciri dari kapitalisme itu sendiri antara lain

1. Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi

⁵ Francis X Wahono, *Kapitalisme Pendidikan: Antara Kompetisi Dan Keadilan* (INSIST Press, Cindelaras bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2001).

⁶ Pasiska Dan and Ongky Alexander, ‘Diplomasi Islam: Pendidikan Nilai-Nilai Islam Dan Kapitalisasi’, *Prodising ISID*, 1, 2020, 194–203.

2. Kepemilikan alat-alat produksi ditangan individu
3. Individu bebas memilih pekerjaan atau usaha yang dipandang baik bagi dirinya
4. Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar
5. Pasar berfungsi memberikan “signal” kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga
6. Campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin
7. Menggerakkan perekonomian dalam mencari laba

Dalam sistem kapitalisme, penindasan tidak hanya terjadi melalui kekuasaan politik yang otoriter saja tetapi juga dapat terjadi dalam berbagai bidang. Dalam hal ini, juga tidak dapat dipungkiri bahwa sistem kapitalisme juga dapat terjadi dalam dunia pendidikan. Kapitalisme pendidikan dapat terjadi apabila prinsip kapitalisme digunakan dalam sektor pendidikan. Menurut Francis Wahono, kapitalisme pendidikan merupakan arah pendidikan yang dibuat sedemikian rupa sehingga pendidikan menjadi pabrik tenaga kerja yang cocok untuk tujuan kapitalis tersebut. Dalam hal ini, kita dihadapkan pada pilihan antara pendidikan kompetisi ekonomi yang mencari kemenangan diri dan pendidikan keadilan sosial yang menjamin kemandirian. Pendidikan ekonomi yang mencari kemenangan diri, akan menciptakan korban yakni mereka yang kalah berkompentensi, tetapi disisi lain tetap membuahakan keuntungan finansial bagi yang menang. Sementara, pendidikan keadilan sosial yang menjamin kemandirian akan menuntut biaya yang tidak tentu membuahakan bunga uang atau keuntungan finansial langsung, namun akan lebih mengangkat banyak orang yang mampu menentukan dirinya sendiri. Dimana dalam hal ini terdapat dua pilihan yaitu :

- a. Pendidikan elitis yang meminggirkan yang miskin dan tak produktif,
- b. Pendidikan yang membebaskan, memberdayakan semua orang menurut bakat dan keterbatasannya sehingga menjadi orang realis dan kreatif.

Manusia yang dihasilkan oleh ideologi kapitalisme adalah manusia yang dalam pikiran dan perhatian selalu dikerubungi oleh pencarian strategi untuk menghasilkan keuntungan diri sendiri yang sebesar-besarnya. Negara tidak membatasi kepemilikan perorangan didalam sektor pendidikan, artinya satuan penyelenggara pendidikan dapat dikuasai oleh perorangan (Sektor swasta/Aktor non negara), dimana segala kebijakannya diatur oleh sektor swasta tersebut. Pengelola sektor pendidikan (pihak swasta ini) mulai bersaing antara satu dengan yang lainnya. Bagi pihak pengelola pendidikan yang memenangkan persaingan akan mendapatkan pengguna jasa pendidikan lebih banyak. Modal dari pihak pengelola sektor pendidikan pun akan masuk dan dapat diakumulasikan. Ketika mengikat makan akan terjadi monopoli sehingga penentuan harga (biaya pendidikan) tanpa ada penawaran dan permintaan terlebih dahulu dengan para pengguna jasa pendidikan. Pengelola pendidikan pun menawarkan harga (biaya pendidikan) tanpa memikirkan kemampuan dari pihak pengguna jasa pendidikan. Jelas hal ini akan merugikan bagi pihak pengguna jasa pendidikan, karena mereka tidak diberi kesempatan untuk menawar harga (biaya pendidikan) akhirnya akan muncul kesenjangan-kesenjangan bahwa orang yang kaya lah yang bisa mendapatkan pendidikan tersebut.

Sedangkan bagi pihak pengguna jasa pendidikan yang kurang mampu akan kesulitan dalam mendapatkan pendidikan tersebut.⁷

Kapitalisme pendidikan telah melahirkan mental yang jauh dari cita-cita pendidikan sebagai praktik pembebasan dan agenda pembudayaan. Dengan hal itu, sekolah saat ini tidak mengembangkan semangat belajar yang sebenarnya. Sekolah tidak menanamkan kecintaan pada ilmu atau mengajarkan keadilan, anti korupsi, atau anti penindasan. Sekolah lebih menekankan pengajaran menurut kurikulum yang telah di paket demi memperoleh sertifikat selebar bukti untuk mendapatkan legitimasi bagi individu untuk memainkan perannya dalam pasar kerja yang tersedia. Ada beberapa dampak yang dapat ditimbulkan akibat terjadinya kapitalisme pendidikan ini antara lain sebagai berikut :

1. Peran negara dalam pendidikan semakin menghilang
Hilangnya peran negara dalam pendidikan akan berdampak semakin banyaknya kemiskinan yang ada di negara ini. Hal ini terjadi dikarenakan banyak anak yang gagal dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya.
2. Masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial ekonomi
Hal ini terjadi karena pendidikan yang berkualitas hanya bisa dinikmati oleh sekelompok masyarakat dengan pendapatan menengah keatas. Untuk masyarakat dengan pendapatan menengah kebawah kurang bisa mengakses pendidikan tersebut.
3. Indonesia juga akan tetap berada dalam sistem kapitalisme global
Indonesia akan tetap berada dalam sistem kapitalis global pada berbagai sektor kehidupan terutama dalam sistem perekonomiannya. Hal ini sudah terbukti bahwa kapitalisme tidak berlaku hanya pada sistem perekonomian namun dalam sistem pendidikan pun saat ini sudah terpengaruh oleh kapitalisme.
4. Dalam sistem kapitalis negara hanya sebagai regulator atau fasilitator
Pada sistem kapitalis ini, peran negara hanya sebagai regulator atau fasilitator. Yang berperan aktif dalam sistem pendidikan adalah pihak swasta, sehingga muncul otonomi-otonomi kampus atau sekolah yang intinya semakin membuat negara tidak ikut campur tangan terhadap sekolah pendidikan. Hal tersebut berakibat bahwa sekolah harus kreatif dalam mencari dana bila ingin tetap bertahan. Mulai dari membuka bisnis hingga menaikkan biaya pendidikan sehingga pendidikan memang benar-benar dikomersilkan dan sulit dijangkau masyarakat yang kurang mampu.
5. Pendidikan hanya bisa diakses golongan menengah keatas
Biaya pendidikan yang semakin mahal mengakibatkan pendidikan hanya diperuntukan bagi masyarakat yang mampu sedangkan bagi warga yang mampu sedangkan bagi warga yang kurang mampu merasa kesulitan dalam memperoleh pendidikan
6. Praktek KKN semakin merajalela
Biaya pendidikan yang semakin mahal membuat para orang tua yang memiliki penghasilan tinggi akan memasukkan anaknya dengan memberikan sumbangan uang pendidikan dengan jumlah yang sangat besar meskipun kecerdasan dari peserta didik tersebut sangatlah kurang. Sehingga nantinya, uang akan dijadikan

⁷ Kartika Nur Umami, 'Kapitalisasi Pendidikan Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam', *Jurnal Psikologi Islam Al-Qalb*, 11.2 (2020), 45-54.

patokan lulus atau tidaknya calon siswa baru diterima di sebuah lembaga pendidikan.

7. Kapitalisme pendidikan bertentangan dengan tradisi manusia

Sistem kapitalis ini bertentangan dalam hal visi pendidikan yang seharusnya strategi untuk eksistensi manusia juga untuk menciptakan keadilan sosial, wahana untuk memanusiakan manusia serta wahana untuk pembebasan manusia, diganti oleh suatu visi yang meletakkan pendidikan sebagai komoditi

Semua dampak tersebut bermula karena adanya privatisasi yaitu penyerahan tanggung jawab pendidikan ke pihak swasta dan tentunya pemerintah sudah tidak ikut campur tangan dalam pengelolaan sistem pendidikan. Disini pemerintah hanya sebagai regulator/fasilitator dan kebijakan sepenuhnya diserahkan kepada pihak swasta. Dengan melihat fenomena pendidikan di Indonesia saat ini paham kapitalisme dapat diidentifikasi telah melekat dan mengakar dalam sistem pendidikan. Hal ini dapat ditinjau setidaknya dari dua aspek berikut ini :

1. Penyelenggaraan sistem pendidikan

Baru-baru ini pemerintah telah menyelenggarakan pendidikan gratis pada tingkat pendidikan dasar (SD-SMP), bahkan sudah mulai sampai ke tingkat SMA. Pendidikan gratis ini merupakan suatu program yang dilakukan untuk memenuhi tugas UNESCO dalam program wajib belajar diseluruh dunia. Program wajib belajar tanpa membayar biaya pendidikan yang diluncurkan oleh pemerintah adalah solusi untuk memecahkan masalah mengenai ketidakmampuan masyarakat untuk membayar biaya pendidikan dengan catatan, bahwa program wajib belajar yang gratis tersebut tetap terjaga kualitasnya. Namun apa yang terjadi, pikiran kapitalisme rupanya telah merasuki sistem pendidikan di Indonesia dengan alasan untuk meningkatkan kualitas peserta didik diciptakan kluster-kluster dalam sistem pendidikan yakni munculnya kelas-kelas bertaraf internasional di berbagai sekolah dengan biaya tertentu sehingga kelasnya pun dibedakan dari kelas yang gratis yang tentu saja penyelenggaraan kelas bertaraf internasional tersebut menyiratkan : Kategorisasi dalam peserta didik, pembedaan kualitas pembelajaran, pemunculan stratifikasi sosial dalam peserta didik maka dari itu, adanya RSBI bukan hanya dipandang sebagai program yang disinyalir memiliki kepentingan pihak tertentu dalam mengumpulkan kekayaan tetapi juga bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menuntut adanya persamaan dalam penyelenggaraan pendidikan bagi warga negara Indonesia.

2. Penyelenggaraan UN

Kekacauan yang terjadi dalam penyelenggaraan UN seperti kebocoran soal yang terorganisir karena melibatkan kepala sekolah dan panitia penyelenggara merupakan salah satu bukti dari berjalannya kapitalisme secara halus dalam sistem pendidikan di Indonesia. Artinya yang menjadi tujuan utama dari para komponen pendidikan adalah upaya untuk mendapatkan materi dengan berbagai cara.

C. Perspektif Sosiologi dan Islam terhadap Kapitalisasi dalam Pendidikan

Kapitalisme pendidikan merupakan faktor yang merubah pandangan terhadap logika pendidikan, dimana pendidikan tidak lagi sebagai *public good* melainkan telah berubah menjadi *private goods*. Lembaga pendidikan hanya dijadikan sebagai sarana

akumulasi kapital yang disebabkan adanya privatisasi pendidikan. Hal ini merupakan imbas pemberlakuan kebijakan *kapitalisme* dalam sistem perekonomian di Indonesia.⁸

Amanat Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3 telah menyebutkan, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁹ Tujuan pendidikan yang disebutkan diatas, menjadi kesadaran bagi pengelola lembaga pendidikan untuk mengatur kurikulum pendidikan sebagai upaya menyiapkan manusia yang berpengetahuan luas dan bijak.

Dewasa ini, institusi pendidikan seolah sarat dengan nilai ekonomi: “Ada harga ada jalan”. Artinya, kemampuan ekonomi masyarakat sangat tinggi menentukan dimana anak-anak akan bersekolah. Tempat pendidikan anak sangat bergantung pada kemampuan keuangan orang tua. Padahal, terlepas dari kemampuan, kualitas beberapa lembaga pendidikan masih akan mempertimbangkan kemampuan calon siswa. Penyimpangan dari nilai ekonomi ini, menjadikan pelayanan pendidikan kurang mendapatkan kepercayaan masyarakat terutama kalangan kelas menengah atau bawah. Karena pelayanan pendidikan yang ada saat ini, tidak lagi melihat seseorang dari kemampuan intelektualnya melainkan hanya melihat persoalan kelas atau golongan, khususnya, dari sisi ekonomis. Orang-orang yang berasal dari keluarga atau status sosial ekonomi atas, akan tetap dapat bersekolah walaupun tingkat kecerdasannya kurang tetapi mereka memiliki kemampuan untuk membayar biaya pendidikannya. Namun untuk masyarakat kelas menengah dan bawah, tidak jelas benar apakah bisa sekolah, melanjutkan pendidikan, atau tidak. Seseorang yang berasal dari keluarga kelas bawah mungkin saja ia tetap dapat bersekolah atau melanjutkan pendidikan, jika ia memperoleh beasiswa, misalnya. Informasi tentang beasiswa semacam itu tidak mesti dapat diakses. Lebih dari itu, di mana pun, beasiswa selalu bersifat kompetitif. Artinya, tidak semua orang yang mengajukan permohonan dapat memperolehnya. Padahal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV Bagian Kesatu tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara Pasal 5 Ayat 1-5, menjelaskan bahwa:

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
5. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Disinilah, tampaknya, dapat dimaklumi jika banyak orang memandang bahwa pemerintah belum mampu mewujudkan hak-hak warga

⁸ Yuni Putri Rohmatillah, ‘Komodifikasi Agama Pada Hijrah Fest Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Kapitalisme’ (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor, ‘Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)’, Jakarta: Pustaka Pelajar, 20AD.

negaranya akan pendidikan. Bahkan, tidak sedikit orang yang sepakat bahwa pendidikan memang tidak diperuntukkan bagi rakyat kelas ekonomi menengah ke bawah.

Tuntutan era globalisasi, mendorong berkembangnya pola pendidikan Indonesia ke arah pendidikan yang materialistik. Kondisi ini telah memicu pergeseran paradigma pendidikan di segala aspek terutama yang terkait dengan refleksi pendidikan, yang pada hakekatnya harus mengutamakan kebutuhan peserta didik. Esensi pendidikan baik dalam keluarga, masyarakat, maupun sekolah nampaknya mulai mengalami kemunduran. Jaminan bahwa setiap anak akan mendapat pendidikan yang baik dan benar masih perlu dipertanyakan. Isnaeni dalam blognya menyatakan bahwa, tata sosial yang kapitalis sekuler menyajikan menu individualis dan materialis yang harus disantap oleh para generasi mulai bayi, balita, anak-anak sampai dewasa. Dunia pendidikan memiliki andil yang tidak kecil terkait krisis multidimensi, karena tidak mampu melahirkan pribadi-pribadi utuh yang mampu menyelesaikan problematika bangsa.¹⁰

Rendahnya perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan berdampak pada bobroknya dunia pendidikan di Indonesia dengan adanya praktik komersialisasi dan kapitalisasi pendidikan. Rendahnya anggaran pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah membuat praktik komersialisasi dan kapitalisasi pendidikan menjadi semakin subur dengan dalih untuk menutupi kekurangan biaya operasional yang tidak dipenuhi oleh pemerintah.¹¹ Membuat pendidikan menjadi berkualitas memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, namun bukan berarti hal itu dapat begitu saja dibebankan kepada masyarakat. Hal tersebut tetap merupakan kewajiban pemerintah yang harus mampu menjamin pendidikan setiap warganya, baik kaya ataupun miskin, tanpa membedakannya.

Pada dasarnya, pendidikan adalah hak dasar setiap warga masyarakat, kaya atau miskin. Pemerintah berkewajiban untuk memastikan bahwa semua warga masyarakat dapat memperoleh akses pendidikan secara mudah dan murah. Namun kenyataan yang ada di masyarakat justru berbanding terbalik dengan esensi pendidikan itu sendiri. Saat ini, masyarakat, terutama dari kalangan bawah atau miskin tidak sanggup membayar biaya pendidikan yang semakin melejit tinggi.

Pada dasarnya, pendidikan adalah hak dasar setiap warga masyarakat, kaya atau miskin. Pemerintah berkewajiban untuk memastikan bahwa semua warga masyarakat dapat memperoleh akses pendidikan secara mudah dan murah. Namun kenyataan yang ada di masyarakat justru berbanding terbalik dengan esensi pendidikan itu sendiri. Saat ini, masyarakat, terutama dari kalangan bawah atau miskin tidak sanggup membayar biaya pendidikan yang semakin melejit tinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada dasarnya, pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara dan pemerintah berkewajiban untuk memastikan bahwa semua warga masyarakat dapat memperoleh akses pendidikan secara mudah dan murah. Namun kenyataan yang ada di masyarakat masih adanya kapitalisasi pendidikan yang berdampak pada hak pendidikan yang seharusnya diterima oleh setiap warga negara. Hal tersebut menimbulkan adanya

¹⁰ Ankarlina Pandu Primadata and Dwi Kasi Kusumawati, 'Modernisasi Pendidikan Di Indonesia Sebuah Perspektif Sosiologis Terhadap Dunia Pendidikan Di Indonesia', *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3.1 (2014).

¹¹ Ridwan Idris, 'APBN Pendidikan Dan Mahalnya Biaya Pendidikan', *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 13.1 (2010), 92–110.

kesenjangan di masyarakat dan berakibat semakin meningkatnya praktek KKN di lembaga pendidikan karena yang memiliki akses pendidikan yang berkualitas hanya kalangan masyarakat tertentu.

Adapun peran negara dalam mengatasi permasalahan kapitalisasi lembaga pendidikan ini semakin menghilang sehingga peran negara hanya sebagai regulator atau fasilitator. Yang berperan aktif dalam sistem pendidikan adalah pihak swasta, sehingga muncul otonomi-otonomi kampus atau sekolah yang intinya semakin membuat negara tidak ikut campur tangan terhadap sekolah pendidikan. Hal tersebut berakibat bahwa sekolah harus kreatif dalam mencari dana bila ingin tetap bertahan.

DAFTAR REFERENSI

- Anshori, Cecep Sudirman, 'Ukhuwah Islamiyah Sebagai Fondasi Terwujudnya Organisasi Yang Mandiri Dan Profesional', *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14.1 (2016), 117–25
- Az-Zandani, Syaikh Abdul Majid, *Ensiklopedi Iman* (Pustaka Al-Kautsar, 2016)
- Dahlan, Abdul Aziz, and *Ensiklopedi Hukum Islam*, 'Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve', *Jilid V*, 1998
- Dan, Pasiska, and Ongky Alexander, 'Diplomasi Islam: Pendidikan Nilai-Nilai Islam Dan Kapitalisasi', *Prodising ISID*, 1, 2020, 194–203
- Idris, Ridwan, 'APBN Pendidikan Dan Mahalnya Biaya Pendidikan', *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 13.1 (2010), 92–110
- Nomor, Undang-Undang Republik Indonesia, 'Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)', *Jakarta: Pustaka Pelajar*, 20AD
- Primadata, Ankarlina Pandu, and Dwi Kasi Kusumawati, 'Modernisasi Pendidikan Di Indonesia Sebuah Perspektif Sosiologis Terhadap Dunia Pendidikan Di Indonesia', *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3.1 (2014)
- Rohmatillah, Yuni Putri, 'Komodifikasi Agama Pada Hijrah Fest Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Kapitalisme' (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)
- Umami, Kartika Nur, 'Kapitalisasi Pendidikan Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam', *Jurnal Psikologi Islam Al-Qalb*, 11.2 (2020), 45–54
- Wahono, Francis X, *Kapitalisme Pendidikan: Antara Kompetisi Dan Keadilan* (INSIST Press, Cindelas bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2001)
- Yunus, Firdaus M, 'Pendidikan Berbasis Realitas Sosial: YB Mangunwijaya-Paulo Freire', *Yogyakarta: Logung Pustaka*, 1 (2007)